



E-journal Field of Economics, Business, and Entrepreneurship (EFEBE)

DETERMINAN PENGELUARAN PANGAN 34 PROVINSI DI INDONESIA PADA MASA COVID-19 MENGGUNAKAN REGRESI KUANTIL

Rio Yohanes¹, Asih Murwiati²

^{1,2} Lampung University

riyohanes01@gmail.com

Informasi Naskah

Update Naskah:

Dikumpulkan: 01 Agustus 2025

Diterima: 02 November 2025

Terbit/Dicetak: 12 November 2025

Keywords:

Covid-19, Food Expenditure, Food Insecurity, Income Inequality, Quantile Regression.

Abstract

This study investigates the primary factors influencing household food expenditure in Indonesia, particularly in the context of the economic impacts of the Covid-19 pandemic, rising food insecurity (Prevalence of Undernourishment/PoU), and persistent income inequality (Gini Index). The research aims to analyze the influence of Provincial Minimum Wage (UMP), Gini Index, Food Insecurity Prevalence (PKP), and Non-Food Expenditure (PNM) on household food expenditure. Employing a quantitative approach with Quantile Regression, the study examines these relationships across various distribution points. The findings reveal that UMP negatively and significantly affects food expenditure at the 25th and 50th percentiles, while the Gini Index shows a positive and significant influence at the same quantiles. Furthermore, PKP negatively and significantly impacts food expenditure at the 75th and 85th percentiles. Conversely, PNM consistently exhibits a positive and significant relationship with food expenditure across all analyzed quantiles (25th, 50th, 75th, and 85th). These results offer valuable insights for policymakers in developing targeted strategies to enhance food security and promote economic well-being in Indonesia.

A. PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia telah mengalami guncangan signifikan akibat pandemi Covid-19 tahun 2020, yang secara langsung memicu deflasi dan ketidakstabilan ekonomi di seluruh sektor. Sebagai dampaknya, pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia menyusut sebesar -5,32% pada Q1 2020 dari periode sebelumnya, terutama karena penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dimana membuat lebih sempitnya ruang gerak perekonomian. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia secara konsisten berupaya mengurangi dampak rugikan pandemi ini melalui kebijakan-kebijakan yang adaptif dan proaktif. Hasilnya, perekonomian nasional menunjukkan pemulihan yang mengesankan, dengan pertumbuhan PDB mencapai 3,69% pada tahun 2021, membalikkan kontraksi -2,07% pada tahun 2020, dan terus menjaga stabilitas pertumbuhan di atas 5% sepanjang tahun 2022 serta 2023, menegaskan ketahanan ekonomi di tengah tantangan global.

Di tengah upaya pemulihan ekonomi tersebut, isu ketahanan pangan dan ketimpangan pendapatan tetap menjadi prioritas yang mendesak bagi pembangunan nasional. Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) kedua, yaitu "Tanpa Kelaparan," merupakan komitmen global yang berambisi mengakhiri kelaparan, meningkatkan gizi, dan mencapai ketahanan pangan secara universal pada tahun

* Corresponding Author.

Rio Yohanes, e-mail : riyohanes01@gmail.com

2030. Data menunjukkan peningkatan Prevalensi Ketidakcukupan Gizi (PoU) di Indonesia, yang mengkhawatirkan, dari 7,63% pada tahun 2019 menjadi 8,34% pada tahun 2020, dan terus merangkak naik hingga mencapai 10,21% pada tahun 2022 (FAO, 2023). Angka ini secara jelas mengindikasikan adanya tantangan serius dalam pemenuhan kebutuhan pangan dasar Masyarakat. Lebih lanjut, analisis menunjukkan disparitas PoU yang signifikan antarwilayah, contohnya timur Indonesia yakni Papua, mencatat PoU tertinggi sebesar 36,18% pada tahun 2020, jauh melampaui angka di Bali (1,84%) dan DI Yogyakarta (2%). Selain itu, ketimpangan pendapatan, yang diukur dengan Indeks Gini, khususnya di wilayah Pulau Jawa, juga mengindikasikan distribusi pendapatan yang belum merata, memengaruhi secara langsung pola konsumsi rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2021). Situasi ini menyebabkan masyarakat berpendapatan rendah cenderung mengalokasikan porsi mayoritas pendapatan mereka untuk kebutuhan makanan dibandingkan non-makanan, yang pada gilirannya mencerminkan tingkat kesejahteraan yang lebih rendah.

Urgensi penelitian ini muncul dari kebutuhan mendalam untuk memahami secara komprehensif determinan belanja pangan rumah tangga, mengingat dampaknya yang krusial terhadap kesejahteraan masyarakat dan upaya pencapaian SDG 2. Dengan melakukan analisis hubungan antara pengeluaran pangan dengan variabel-variabel makroekonomi seperti Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Gini, Prevalensi Kerawanan Pangan (PKP), dan Pengeluaran Non Makanan (PNM), riset ini diupayakan mampu memberikan pengetahuan yang sangat berharga bagi para pemangku kebijakan. Wawasan ini diharapkan dapat memfasilitasi perumusan strategi yang lebih efektif dan terarah dalam meningkatkan ketahanan pangan serta kesejahteraan ekonomi masyarakat. Selain itu, penelitian ini turut memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur ilmiah yang sudah ada dengan mengaplikasikan metode Regresi Kuantil. Pendekatan ini memungkinkan analisis variabel-variabel tersebut pada berbagai persentil distribusi data, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih nuansif dan mendalam mengenai dinamika pengeluaran pangan di Indonesia. Riset bertujuan mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh Upah Minimum Provinsi, Indeks Gini, Prevalensi Kerawanan Pangan, dan Pengeluaran Non Makanan secara spesifik terhadap Pengeluaran Pangan di Indonesia.

Dalam hal menuju sasaran hasil, olehnya riset ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode Regresi Kuantil, sebuah teknik statistik non-parametrik oleh Koenker dan Bassett (1978) (Koenker & Hallock, 2001). Menurut Koenker & Hallock (2001), keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya untuk memodelkan hubungan antara variabel prediktor dan respons tidak hanya pada rata-rata, tetapi juga pada berbagai persentil atau kuantil dari distribusi data. Hal ini menjadi sangat relevan dan bermanfaat terutama ketika distribusi data menunjukkan karakteristik yang beragam dan tidak mengikuti asumsi distribusi normal, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dibandingkan metode regresi linier biasa. Di samping itu, analisis deskriptif juga akan diintegrasikan untuk memberikan penjelasan yang lebih kontekstual dan interpretatif terhadap temuannya analisis kuantitatif.

Secara konseptual, penelitian ini berlandaskan pada fondasi beberapa teori ekonomi makro dan mikro yang relevan. Teori Konsumsi menjadi dasar utama, yang menyatakan bahwa terdapat hubungan langsung antara tingkat konsumsi individu atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang mereka miliki (Amalia & Mahmudiono, 2017). Selanjutnya, Teori Ketimpangan Pendapatan memberikan kerangka analisis untuk memahami distribusi pendapatan dalam suatu populasi, dengan Indeks Gini sebagai salah satu metrik kunci untuk mengukur tingkat ketidakmerataan distribusi tersebut. Konsep Ketahanan Pangan, yang didefinisikan oleh pilar-pilar utamanya yaitu ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan pangan juga menjadi landasan fundamental dalam penelitian ini, menekankan pentingnya akses yang merata terhadap sumber daya pangan yang cukup dan bergizi (Sugianti et al., 2023). Selain itu, Teori Upah juga digunakan untuk memahami bagaimana perubahan upah minimum dapat memengaruhi perilaku konsumsi dan pengeluaran pangan rumah tangga (Sukirno, 2019).

Kajian terdahulu juga telah memberi gambaran akan determinan pengeluaran pangan. Misalnya, penelitian oleh Faradina et al (2018). menemukan bahwa karakteristik demografi keluarga, tingkat pendidikan ibu, serta pendapatan keluarga secara kolektif memengaruhi asupan dan pengeluaran makanan rumah tangga. Eriawati (2019) mengidentifikasi bahwa inflasi makanan memiliki pengaruh negatif dan signifikan, sementara ukuran populasi justru berpengaruh positif signifikan akan belanja

makanan. Senada dengan itu, Zainuddin et al (2020) menemukan bahwa PDB per kapita, inflasi, harga beras, dan belanja non-makanan merupakan determinan yang secara signifikan memengaruhi pengeluaran makanan rumah tangga di Jawa Timur.

Berdasarkan sintesis dari tinjauan literatur dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan secara detail, penelitian ini mengajukan empat hipotesis utama yang akan diuji. Pertama, Indeks Gini diduga ada pengaruhnya bagi Pengeluaran Pangan, berarti semakin tinggi ketimpangan pendapatan, semakin tinggi pula proporsi pengeluaran untuk pangan di kalangan masyarakat berpendapatan rendah. Kedua, Prevalensi Ketidakcukupan Pangan diduga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan, menunjukkan bahwa peningkatan kerawanan pangan dapat berkorelasi dengan penurunan kemampuan atau alokasi pengeluaran untuk pangan. Ketiga, Pengeluaran Non Makanan diduga berpengaruh positif signifikan bagi Pengeluaran Pangan, yang mungkin mencerminkan adanya hubungan kompleks antara pengeluaran untuk barang dan jasa non-makanan dengan prioritas pengeluaran pangan. Terakhir, Upah Minimum Provinsi diduga berpengaruh negatif signifikan pada Pengeluaran Pangan, yang dapat mengimplikasikan bahwa peningkatan upah minimum, dalam konteks tertentu, mungkin mengurangi proporsi pengeluaran untuk pangan karena peningkatan daya beli dan akses terhadap kebutuhan lainnya.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kajian literatur merupakan fondasi utama dalam memahami kerangka konseptual yang menopang penelitian ini, sekaligus menyediakan landasan teoritis dan empiris yang kuat. Penelitian ini secara fundamental berpegang pada:

1. Landasan Teori

Kajian literatur ini secara fundamental berpegang pada Teori Konsumsi, yang secara klasik menjelaskan bahwa pola dan tingkat konsumsi individu maupun rumah tangga sangat bergantung pada besarnya pendapatan yang mereka peroleh (Handriyani et al., 2018). Teori ini menyatakan bahwa setiap peningkatan pendapatan akan diiringi dengan peningkatan alokasi pengeluaran untuk berbagai kebutuhan, dengan prioritas yang berbeda-beda (Amalia & Mahmudiono, 2017). Dalam konteks kebutuhan dasar, seperti pangan, teori ini seringkali dikaitkan dengan *engels law*, dimana proporsinya pendapatan yang dihabiskan bagi pangan akan turun seiring dengan peningkatan penerimaan, meskipun pengeluaran absolut untuk pangan mungkin tetap bertambah. Selanjutnya, menurut Todaro & Smith (2011) teori Ketimpangan Pendapatan menjadi lensa krusial untuk menganalisis distribusi kekayaan dan pendapatan di suatu wilayah atau negara, dengan Indeks Gini sebagai metrik standar yang secara luas digunakan untuk mengukur derajat ketidakmerataan distribusi tersebut dalam masyarakat. Menurut Lorenz (1905) semakin tinggi nilai Indeks Gini, semakin besar ketimpangan pendapatan yang ada, yang pada gilirannya dapat memengaruhi daya beli dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok, termasuk pangan, karena kelompok berpendapatan rendah akan lebih rentan terhadap fluktuasi harga atau ketersediaan.

Penelitian ini juga secara mendalam mengintegrasikan konsep Ketahanan Pangan, sebuah gagasan multidimensional yang tidak hanya terbatas pada ketersediaan fisik pangan, tetapi juga mencakup aspek aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pasokan pangan yang merata bagi seluruh populasi. Pilar-pilar ketahanan pangan ketersediaan yang cukup, akses fisik dan ekonomi yang mudah, pemanfaatan pangan yang tepat dan bergizi, serta stabilitas pasokan sepanjang waktu menjadi landasan fundamental dalam menganalisis isu-isu terkait pengeluaran pangan rumah tangga (Amalia & Mahmudiono, 2017). Prevalensi Ketidakcukupan Gizi (PoU) yang menjadi indikator kunci dalam konteks ini, secara langsung mencerminkan sejauh mana masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi asupan gizi yang diperlukan, dan peningkatan PoU menjadi sinyal adanya kerawanan pangan yang membutuhkan intervensi kebijakan yang serius (FAO, 2023). Terakhir, Teori Upah juga memberikan perspektif penting mengenai bagaimana kebijakan penetapan upah minimum, seperti Upah Minimum Provinsi (UMP), dapat memengaruhi daya beli pekerja dan pada akhirnya berdampak pada alokasi pengeluaran mereka, termasuk untuk kebutuhan pangan (Ningtias & Anwar, 2021)). Peningkatan upah minimum secara teoritis diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat, namun dampaknya terhadap pengeluaran pangan bisa bervariasi tergantung pada struktur pengeluaran rumah tangga dan

prioritas kebutuhan lainnya, seperti pergeseran dari kuantitas ke kualitas pangan.

2. Kajian Empiris

Kajian empiris dari penelitian-penelitian terdahulu memberikan bukti konkret yang memperkuat argumen teoritis dan membentuk dasar perumusan hipotesis dalam penelitian ini. Faradina et al (2018) misalnya, menemukan bahwa faktor-faktor demografi seperti jumlah anggota keluarga, tingkat pendidikan ibu, pendapatan keluarga, serta durasi pernikahan secara kolektif memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola asupan dan pengeluaran makanan rumah tangga. Temuan ini menggarisbawahi kompleksitas faktor-faktor sosial dan ekonomi yang berperan dalam menentukan konsumsi pangan. Penelitian oleh Eriawati (2019) lebih lanjut menunjukkan bahwa inflasi makanan memiliki pengaruh negatif signifikan pada belanja makanan, mengindikasikan bahwa kenaikan harga pangan dapat secara langsung mengurangi kapasitas rumah tangga untuk membeli makanan. Sebaliknya, studi tersebut juga menemukan bahwa ukuran populasi berpengaruh positif signifikan pada belanja makanan, yang dapat diinterpretasikan sebagai peningkatan kebutuhan agregat seiring bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, Zainuddin et al (2020) dalam penelitian mereka di Jawa Timur, mengidentifikasi bahwa PDB per kapita, inflasi, harga beras, dan belanja non-makanan merupakan variabel-variabel yang secara signifikan memengaruhi pengeluaran makanan rumah tangga. Penelitian ini secara kumulatif memberikan dukungan empiris terhadap adanya hubungan antara variabel ekonomi makro dan mikro dengan pola pengeluaran pangan, membentuk dasar bagi pengembangan hipotesis dalam studi ini.

3. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan sintesis dari landasan teoritis dan bukti-bukti empiris yang telah dipaparkan secara detail, penelitian ini mengajukan serangkaian hipotesis utama yang akan diuji secara statistik. Pertama, diduga bahwa Indeks Gini berpengaruh positif signifikan pada Pengeluaran Pangan, yang secara logis diasumsikan dalam kondisi ketimpangan pendapatan yang tinggi, kelompok berpendapatan rendah cenderung mengarahkan proporsi pendapatannya guna memenuhi kebutuhan pangan esensial. Kedua, Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PKP) diduga memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan, yang menyiratkan bahwa peningkatan tingkat kerawanan pangan dapat berkorelasi dengan penurunan pengeluaran aktual untuk makanan, mungkin karena keterbatasan daya beli atau pasokan. Ketiga, Pengeluaran Non Makanan diduga memiliki pengaruh positif signifikan pada Pengeluaran Pangan, yang menunjukkan adanya hubungan kompleks di mana peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan mungkin juga disertai oleh peningkatan pengeluaran pangan seiring dengan peningkatan kesejahteraan secara umum. Terakhir, Upah Minimum Provinsi (UMP) diduga berpengaruh negatif dan signifikan pada Pengeluaran Pangan, yang dapat mengimplikasikan bahwa dengan peningkatan UMP, proporsi pengeluaran untuk pangan mungkin menurun karena adanya peningkatan daya beli yang memungkinkan alokasi dana ke kebutuhan lain atau kualitas pangan yang lebih baik.

C. METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian ini mencakup pengeluaran pangan rumah tangga di seluruh provinsi di Indonesia. Objek utama dalam penelitian ini adalah data tingkat provinsi yang berkaitan dengan pengeluaran pangan, serta berbagai variabel makroekonomi dan sosial yang diduga memengaruhinya. Variabel-variabel tersebut meliputi Upah Minimum Provinsi (UMP), Indeks Gini, Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PKP), dan Pengeluaran Non Makanan (PNM). Periode data yang digunakan adalah tahun 2020. Penelitian ini menggunakan data tingkat provinsi di seluruh wilayah Indonesia. Data yang dianalisis berasal dari Badan Pusat Statistik, mencerminkan kondisi sosio-ekonomi dan demografi di berbagai daerah.

Teknik guna memperoleh data menggunakan studi kepustakaan serta pengumpulan data sekunder. Berikut definisi operasional variabel riset ini:

1. Pengeluaran Pangan

Pengeluaran pangan didefinisikan sebagai total rerata pengeluaran rumah tangga per kapita untuk kebutuhan makanan dalam satu periode tertentu di tingkat provinsi, yang mencerminkan

alokasi pendapatan untuk konsumsi pangan.

2. Upah Minimum Provinsi (UMP)

UMP merupakan standar upah terendah yang ditetapkan pemerintah bagi pekerja di setiap provinsi, berfungsi sebagai indikator daya beli minimum di wilayah tersebut. Indeks Gini adalah ukuran statistik yang merepresentasikan tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di suatu provinsi, dengan nilai antara 0 (kesetaraan sempurna) hingga 1 (ketimpangan sempurna).

3. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PKP)

Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PKP) adalah persentase penduduk di suatu provinsi yang mengalami asupan kalori di bawah ambang batas minimum yang direkomendasikan, mengindikasikan tingkat kerawanan pangan.

4. Pengeluaran Non Makanan (PNM) Pengeluaran Non Makanan (PNM)

Adalah total rata-rata pengeluaran rumah tangga per kapita untuk kebutuhan di luar pangan, seperti sandang, papan, pendidikan, dan transportasi, yang dapat menjadi indikator prioritas konsumsi rumah tangga setelah kebutuhan pangan terpenuhi (BPS, 2008).

Teknik analisis data utama menerapkan Regresi Kuantil. Metode ini dipilih karena kemampuannya untuk menganalisis hubungannya variabel independen dan dependen di berbagai titik distribusi variabel dependen, bukan hanya pada rata-ratanya (Gujarati & Porter, 2011). Pendekatan ini sangat relevan untuk data yang distribusinya tidak normal atau ketika efek variabel independen bervariasi di seluruh rentang distribusi pengeluaran pangan. Regresi Kuantil memungkinkan peneliti untuk memahami bagaimana Upah Minimum Provinsi, Indeks Gini, Prevalensi Ketidakcukupan Pangan, dan Pengeluaran Non Makanan memengaruhi pengeluaran pangan pada berbagai tingkat pendapatan atau kelompok rumah tangga, memberikan gambaran yang lebih detail dan nuansif dibandingkan regresi OLS. Analisis deskriptif juga akan menyertai, untuk menggambarkan karakteristik data dan variabel yang digunakan. Berikut adalah model untuk data regresi:

$$PP_{it} = \beta_0 + \beta_1 PKP_{it} + \beta_2 IG_{it} + \beta_3 UMP_{it} + \beta_4 PNM_{it} + e_{it}$$

Deskripsi :

PP_{it} : Pengeluaran Pangan (Rp)

β_0 : Konstanta

$\beta_1,..,\beta_4$: Koefisien Regresi

PKP_{it} : Prevalensi ketidakcukupan Pangan(%)

IG_{it} : Indeks Gini (Indeks)

UMP_{it} : Upah Minimum Provinsi (Rp) PN_{it}

: Pengeluaran Non Makanan (Rp)

e_{it} : error term

D. Hasil dan Pembahasan

1. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Dalam penelitian ini pengujian normalitas menggunakan Skewnes Kurtosis.

Tabel 1 Hasil Uji Skewnes Kurtosis Normalitas

Variabel	Observasi	Pr(Skewness)	Pr(Kurtosis)	Adj chi ² (2)	Prob> Chi ²
Res	34	0.0359	0.0265	8.04	0.0179

Sumber : Stata 15.

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai residual pada probabilitas adalah 0.0179 yang artinya nilai nya lebih kecil dari $\alpha=5\%$ ($0.0179 < 0.05$), yang berarti bahwa data berdistribusi normal.

b. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser.

Tabel 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Chi ² (1)	Prob > Chi ²
1.8	0.1801

Source : Stata 15.

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa nilai prob > chi² sebesar 0.1801 yang berarti lebih besar dari 0.05. Sehingga data tersebut terbebas dari masalah heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinearitas

Deteksi Multikolinearitas pada penelitian ini menggunakan VIF (*variance inflation factor*).

Tabel 3 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	VIF	1/VIF
LogPNM	1.47	0.67825
LogUMP	1.3	0.769982
LogPKP	1.27	0.78812
IG	1.17	0.852345
Mean VIF	1.3	

Source : Stata 15.

Hasil deteksi multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dalam semua variabel independen menunjukkan bahwa tidak ada masalah multikolinearitas. Secara spesifik, nilai VIF untuk LogPNM adalah 1.47, LogUMP sebesar 1.31, LogPKP sebesar 1.27, dan IG sebesar 1.17.

2. Hasil Estimasi Regresi

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data *cross-section*, berikut hasil estimasi regresi linier berganda pada penelitian ini:

Tabel 4 Hasil Estimasi Regresi

	(1) LogPP
LogPKP	-0.034738 (0.021)
IG	-1.119574 (0.381)
LogUMP	0.1507291 (0.727)
	0.5415415
LogPNM	(0.063)
_cons	4.332582
Observation	34
R-Squared	0.8382

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

Source : Stata 15.

Berdasarkan hasil estimasi pada tabel 4, didapatkan persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{LogPP}_i = 4.333 - 0.038 (\text{LogPKP})_i - 1.120 (\text{IG})_i + 0.158 (\text{LogUMP})_i + 0.542 (\text{LogPNM})_i$$

3. Pengujian Hipotesis

1. Uji-t Statistik

a. Variabel Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Hipotesis:

H₀: tidak ada pengaruh dari variabel prevalensi ketidakcukupan pangan terhadap

variabel pengeluaran pangan.

Ha: Ada pengaruh dari variabel prevalensi ketidakcukupan pangan terhadap variabel pengeluaran

Tabel 5 Hasil Uji T-Statistik Variabel Prevalensi Ketidakcukupan Pangan

Variabel	T-Statistik	t-tabel ($\alpha=5\%$)	Prob	Kesimpulan
LogPKP	-1.63	1.701	0,114	H ₀ diterima

Source : Stata 15.

Hasil Uji T-Statistik menunjukkan variabel Prevalensi Ketidakcukupan Pangan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pengeluaran Pangan di Indonesia. Ini terlihat dari nilai T-Statistik sebesar -1,63, yang mana nilai probabilitasnya(0,114) lebih besar dari ambang batas nilai signifikansi 0,05. Selain itu , nilai T-Statistik tersebut juga lebih kecil dibandingkan nilai t-tabel(1,701) pada tingkat signifikansi 5% dengan *degree of freedom(df)* bernilai 28. Oleh karena itu, hipotesis nol (H₀) diterima dan hipotesis alternatif (Ha) ditolak,yang berarti bahwa Prevalensi Ketidakcukupan Pangan di setiap provinsi di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pangan.

b. Variabel Indeks Gini

Hipotesis:

H₀: Tidak ada pengaruh dari variabel Indeks Gini terhadap variabel Pengeluaran Pangan.

Ha: Ada pengaruh dari variabel Indeks Gini terhadap variabel Pengeluaran Pangan.

Tabel 6 Hasil Uji T-Statistik variabel Indeks Gini

Variabel	T-Statistik	T-Tabel ($\alpha=5\%$)	Prob	Kesimpulan
IG	-2.94	1.701	0.006	H ₀ Ditolak

Source : Stata 15.

Hasil uji t-statistik menunjukkan bahwa Indeks Gini memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap pengeluaran pangan di Indonesia.

Ini terlihat dari nilai t hitung sebesar -2,94. Dengan tingkat signifikansi 5% dan nilai *degree of freedom* (df) 28, nilai probabilitas (0,006) lebih kecil dari nilai t tabel (1,701) dan juga lebih kecil dari tingkat alpha (0,05). Oleh karena itu, hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H₀) ditolak.

c. Variabel Upah Minimum Provinsi

Hipotesis:

H₀: Tidak ada pengaruh dari variabel Upah Minimum Provinsi terhadap variabel Pengeluaran Pangan.

Ha: Ada pengaruh dari variabel Upah Minimum Provinsi terhadap variabel Pengeluaran Pangan.

Tabel 7 Hasil Uji T-Statistik variabel Upah Minimum Provinsi

Variabel	T-Statistik	T-Tabel ($\alpha=5\%$)	Prob	Kesimpulan
LogUMP	2.07	1.701	0.047	H ₀ Ditolak

Source : Stata 15.

Hasil uji t-statistik menunjukkan Upah Minimum Provinsi (UMP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pangan di Indonesia. Ini terlihat dari nilai t-statistik sebesar 2,07, yang lebih besar dari nilai t-tabel (1,701) pada tingkat signifikansi 5% dan nilai *degree of freedom* (df) 28. Selain itu, nilai probabilitas (*p-value*) sebesar 0,047 lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan berpengaruh signifikan diterima, dan hipotesis nol (H₀) ditolak.

d. Variabel Pengeluaran Non

Makanan

Hipotesis:

H₀: Tidak ada pengaruh dari variabel Pengeluaran Non Makanan terhadap variabel Pengeluaran Pangan.

Ha: Ada pengaruh dari variabel Pengeluaran Non Makanan terhadap variabel Pengeluaran Pangan.

Tabel 8 Hasil Uji T-Statistik variabel Pengeluaran Non Makanan

Variabel	T-Statistik	T-Tabel ($\alpha=5\%$)	Prob	Kesimpulan
LogPNM	8.58	1.701	0.000	H ₀ Ditolak

Source : Stata 15.

Hasil uji t-statistik menunjukkan pengeluaran non makanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pangan di Indonesia. Ini terlihat dari nilai t-statistik sebesar 8,58, yang lebih besar dari nilai t-tabel (1,701) pada tingkat signifikansi 5% dan nilai *degree of freedom* (df) 28. Selain itu, nilai probabilitas (p-value) sebesar 0,000 lebih kecil dari batas signifikansi 0,05. Dengan demikian, hipotesis alternatif (Ha) yang menyatakan adanya pengaruh signifikan diterima, dan hipotesis nol (H₀) ditolak.

4. Pembahasan hasil penelitian

a. Pengaruh Prevalensi Ketidakcukupan Pangan Terhadap Pengeluaran Pangan Pada Provinsi Di Indonesia

Dalam model regresi, Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PKP) memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan di Indonesia. Ini berarti, jika PKP meningkat, pengeluaran pangan cenderung menurun. Hasil ini sejalan dengan penelitian Nisa & Triani (2024) yang menemukan bahwa pengeluaran makanan sangat dipengaruhi oleh ketidakamanan pangan, khususnya selama pandemi COVID-19. Ketika pendapatan terbatas, rumah tangga cenderung memprioritaskan kebutuhan mereka dan mengalokasikan sebagian besar uangnya untuk makanan. Sebagaimana dijelaskan oleh (Ihsani & Rohman, 2022), penurunan proporsi pengeluaran untuk makanan umumnya menandakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pendapatan juga seharusnya mendorong konsumsi, termasuk makanan, seperti yang ditunjukkan oleh (Gaol & Sukim, 2023).

Namun, ada paradoks di mana PDB per kapita menunjukkan peningkatan kekayaan, tetapi konsumsi justru menurun. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh inflasi yang tinggi, yang mengikis daya beli masyarakat dan mengurangi peningkatan pendapatan riil. Akibatnya, masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, sulit memenuhi kebutuhan nutrisi yang cukup (Wuryandari, 2015). Pada dasarnya, pola konsumsi pangan mencerminkan tingkat pendapatan dan daya beli rumah tangga. Perbedaan pendapatan menciptakan variasi dalam distribusi pendapatan dan bagaimana rumah tangga membelanjakan uangnya. Saat pendapatan terbatas, permintaan akan makanan menjadi prioritas utama, sehingga sebagian besar pendapatan dialokasikan untuk konsumsi makanan.

b. Pengaruh Indeks Gini Terhadap Pengeluaran Pangan Pada Provinsi Di Indonesia

Dalam model regresi yang diterapkan, Indeks Gini (IG) memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan (PP) di Indonesia. Artinya, semakin tinggi ketidakmerataan pendapatan (Indeks Gini meningkat), pengeluaran pangan cenderung menurun. Proporsi pengeluaran untuk makanan dari total pengeluaran rumah tangga dapat mencerminkan kondisi ekonomi rumah tangga. Rumah tangga dengan pendapatan rendah biasanya mengalokasikan persentase yang lebih besar dari pendapatan mereka untuk makanan, sementara persentase ini akan menurun seiring dengan peningkatan pendapatan rumah tangga.

Selain itu, peningkatan pengeluaran di tingkat daerah juga berperan dalam mengurangi kesenjangan pendapatan. Hal ini pada gilirannya akan mendorong peningkatan pengeluaran pangan secara keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa Indeks Gini memiliki pengaruh besar terhadap pengeluaran pangan di Indonesia, mengingat persentase asupan pangan dapat menjadi indikator rata-rata pendapatan penduduk.

c. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Terhadap Pengeluaran Pangan di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki hubungan positif

dan signifikan dengan pengeluaran pangan di Indonesia. Artinya, semakin tinggi UMP, semakin besar pula pengeluaran untuk kebutuhan pangan. Temuan ini selaras dengan penelitian sebelumnya oleh (Hidayat & Haryatiningsih, 2024). Kenaikan upah minimum terbukti meningkatkan pendapatan pekerja, terutama mereka yang digaji sesuai standar UMP. Dampaknya, rumah tangga pekerja memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan pada makanan. Peningkatan pendapatan ini secara langsung memperkuat daya beli dan mendorong pertumbuhan pengeluaran konsumsi pangan, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar tetapi juga untuk meningkatkan kualitas asupan. Pengaruh UMP terhadap pengeluaran pangan ini melibatkan beberapa mekanisme ekonomi dan sosial. Salah satunya adalah peningkatan pendapatan pekerja, khususnya di sektor formal dengan upah rendah. Kenaikan pendapatan ini secara langsung meningkatkan daya beli mereka, termasuk untuk kebutuhan pangan. Selain itu, peningkatan pendapatan ini juga dapat mendorong masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas konsumsi pangan, seperti beralih ke makanan yang lebih bergizi. Hal ini sesuai dengan Hukum Engel, yang menyatakan bahwa proporsi pengeluaran untuk pangan cenderung lebih besar pada pendapatan rendah. Oleh karena itu, ketika pendapatan naik (misalnya karena kenaikan UMP), pengeluaran pangan secara nominal akan meningkat. Namun, proporsinya terhadap total pengeluaran mungkin akan menurun karena sebagian pendapatan juga dialokasikan untuk barang non-pangan.

d. Pengaruh Pengeluaran Non Makanan Terhadap Pengeluaran Pangan Pada Provinsi Di Indonesia

Berdasarkan analisis regresi, ditemukan bahwa Pengeluaran Non-Makanan (PNM) memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan di Indonesia. Ini berarti, peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan cenderung berkorelasi dengan peningkatan pengeluaran pangan. Pengeluaran non-makanan dapat memberikan dampak signifikan terhadap alokasi pengeluaran pangan, terutama dalam konteks rumah tangga berpendapatan rendah hingga menengah. Fenomena ini erat kaitannya dengan efek substitusi dan keterbatasan anggaran rumah tangga (budget constraint). Ketika rumah tangga menghadapi peningkatan pengeluaran non-makanan misalnya untuk transportasi, pendidikan, perumahan, atau kesehatan dana yang tersedia untuk pangan cenderung berkurang. Akibatnya, rumah tangga mungkin akan mengurangi kuantitas konsumsi pangan mereka atau beralih ke pilihan pangan yang lebih murah dan berkualitas lebih rendah. Dalam situasi seperti ini, rumah tangga akan menentukan skala prioritas pengeluaran, di mana kebutuhan non-makanan yang dianggap esensial atau wajib, seperti listrik, air, atau sewa rumah, sering kali didahulukan dibandingkan pengeluaran pangan. Hal ini menunjukkan bagaimana pengeluaran non-makanan dapat "menekan" konsumsi pangan jika tidak ada tambahan pendapatan yang mengimbanginya. Meskipun demikian, ada pula perspektif yang berbeda, yang sejalan dengan Hukum Engel. Hukum ini menyatakan bahwa semakin tinggi pendapatan rumah tangga, proporsi pengeluaran untuk makanan akan menurun, sementara proporsi pengeluaran untuk non-makanan akan meningkat. Oleh karena itu, peningkatan pengeluaran non-makanan dapat menjadi indikator adanya peningkatan taraf hidup, bukan semata-mata berarti "mengurangi" konsumsi pangan. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa jika kenaikan pengeluaran non-makanan tidak dibarengi dengan kenaikan pendapatan, maka hal tersebut justru dapat berdampak negatif pada kualitas dan kuantitas pangan yang dikonsumsi oleh rumah tangga.

5. Regresi Kuantil

Berikut hasil estimasi Regresi Kuantil

Tabel 9 Hasil Kuantil Menjadi 4 Bagian

Kuantil dar LogPP	Freq.	Persen (%)	Sum
1	9	26.47	26,47
2	8	23.53	50,00
3	9	26.47	76,47
4	8	23.53	100,00
Total	34	100	

Source : Stata 15.

Berdasarkan hasil analisis regresi kuantil, provinsi-provinsi di Indonesia dikelompokkan menjadi empat level berdasarkan pengeluaran makanan. Level pertama mencakup sembilan provinsi, yaitu Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, dan Sulawesi Barat, yang secara kolektif menyumbang 26,47% dari temuan regresi. Selanjutnya, delapan provinsi berada di level kedua, menyumbang 50% dari keseluruhan, meliputi Sumatera Selatan, Bengkulu, Yogyakarta, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku, dan Maluku Utara. Level ketiga terdiri dari sembilan provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Jawa Barat, Bali, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, dengan kontribusi sebesar 76,47%. Terakhir, delapan provinsi lainnya termasuk dalam level keempat, mewakili 100% dari temuan regresi, yaitu Banten, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Papua Barat, Papua, DKI Jakarta, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau.

Table 10 Penduga Parameter Regresi Kuantil

	qr_25	qr_50	qr_75	qr_85
LogPKP	-0.0615*** (0,0208)	-0.0643* (0.0259)	-0.0453 (0.0356)	-0.0353 (0.0319)
IG	-1.727*** (0,372)	-1.718*** (0.463)	-0.642 (0.637)	-0.424 (0.572)
LogUMP	0.0388 (0.0709)	0.0767 (0.0883)	0.195 (0.121)	0.177 (0.109)
LogPNM	0.599*** (0.0616)	0.549*** (0.0766)	0.496*** (0.105)	0.563*** (0.0946)
Cons	5.436*** (1.045)	-5.581*** (1.302)	4.177*** (1.790)	3.492* (1.607)
n	34	34	34	34

Standard errors in parentheses

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001

Source: Stata 15.

Berdasarkan Tabel 10, estimasi parameter menunjukkan perbedaan yang bervariasi di setiap kuantil, yang mengindikasikan kesesuaian penggunaan regresi kuantil dalam menjelaskan data ini. Secara spesifik, penduga intersep menunjukkan tren penurunan dari kuantil $\tau = 0.25$ ke $\tau = 0.85$. Sementara itu, penduga parameter Prevalensi Ketidakcukupan Pangan awalnya meningkat dari kuantil $\tau = 0.25$ ke $\tau = 0.50$, lalu mengalami penurunan dari $\tau = 0.50$ ke $\tau = 0.85$. Pola serupa terlihat pada penduga parameter Upah Minimum Provinsi yang juga meningkat dari kuantil $\tau = 0.25$ ke $\tau = 0.50$ dan kemudian menurun dari $\tau = 0.50$ ke $\tau = 0.85$. Di sisi lain, penduga parameter Indeks Gini secara konsisten menunjukkan penurunan seiring dengan peningkatan nilai kuantil. Terakhir, penduga parameter Pengeluaran Non Makanan mengalami penurunan dari kuantil $\tau = 0.25$ ke $\tau = 0.75$, sebelum akhirnya meningkat kembali dari $\tau = 0.75$ ke $\tau = 0.85$.

Model regresi kuantil yang terbentuk pada masing-masing τ sebagai berikut:

$$Y_{0.25} = 5.436 - 0.0615(\text{LogPKP}) - 1.727(\text{IG}) + 0.0388(\text{LogUMP}) + 0.599(\text{LogPNM})$$

$$Y_{0.50} = 5.581 - 0.0643(\text{LogPKP}) - 1.718(\text{IG}) + 0.0767(\text{LogUMP}) + 0.549(\text{LogPNM})$$

$$Y_{0.75} = 4.177 - 0.0453(\text{LogPKP}) - 0.642(\text{IG}) + 0.195(\text{LogUMP}) + 0.496(\text{LogPNM})$$

$$Y_{0.85} = 3.492 - 0.0353(\text{LogPKP}) - 0.424(\text{IG}) + 0.177(\text{LogUMP}) + 0.563(\text{LogPNM})$$

6. Interpretasi Regresi Kuantil

a. Interpretasi Dari Model Regresi Kuantil $\tau = 0,25$:

Analisis menunjukkan bahwa Pengeluaran Pangan (PP) di Indonesia pada tahun 2020 memiliki nilai dasar 0.7353 ketika semua variabel independen diasumsikan bernilai nol. Angka ini diperoleh dari konstanta positif 5.436 yang telah di-antilogaritma-kan. Ini mengindikasikan bahwa tanpa adanya pengaruh dari variabel lain, Pengeluaran Pangan tetap berada pada tingkat tersebut. Dari 25% kelompok data yang diamati, beberapa variabel menunjukkan pengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pangan. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PKP) dan Indeks Gini (IG) memiliki hubungan negatif dan signifikan dengan Pengeluaran Pangan. Artinya, peningkatan pada PKP dan IG cenderung menurunkan Pengeluaran Pangan. Sebaliknya, Pengeluaran Non Makanan (PNM) memiliki pengaruh positif dan signifikan, menunjukkan bahwa peningkatan pada PNM justru berkaitan dengan peningkatan Pengeluaran Pangan. Lebih lanjut, koefisien dari masing-masing variabel memberikan gambaran spesifik mengenai besarnya pengaruh tersebut. Setiap kenaikan 1 tahun pada Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PKP) akan mengurangi Pengeluaran Pangan (PP) sebesar 0.0615%, dengan asumsi variabel lain tidak berubah. Demikian pula, setiap kenaikan 1 tahun pada Indeks Gini (IG) akan menurunkan Pengeluaran Pangan (PP) sebesar 1.727%, dengan asumsi faktor lain tetap konstan. Sementara itu, setiap peningkatan 1 tahun pada Pengeluaran Non Makanan (PNM) akan meningkatkan Pengeluaran Pangan (PP) sebesar 0.599%, juga dengan asumsi variabel lain konstan.

b. Interpretasi Dari Model Regresi Kuantil $\tau = 0,50$:

Dalam analisis pengeluaran pangan di Indonesia pada tahun 2020, ditemukan bahwa nilai konstanta model adalah -5.581. Setelah diubah dari bentuk logaritma, nilai ini menjadi 0.7467. Angka ini mengindikasikan bahwa jika semua variabel independen tidak memiliki pengaruh, pengeluaran pangan (PP) di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan sebesar 0.7467, dengan asumsi faktor-faktor lain tetap. Selanjutnya, hasil analisis dari 50% kelompok data menunjukkan bahwa Indeks Gini (IG) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pengeluaran pangan (PP). Ini berarti bahwa peningkatan dalam Indeks Gini cenderung menurunkan pengeluaran pangan. Lebih spesifik, koefisien Indeks Gini sebesar 1.718 menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada Indeks Gini akan mengurangi pengeluaran pangan (PP) sebesar 1.718%, asumsi variabel lain tidak berubah. Sebaliknya, Pengeluaran Non Makanan (PNM) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pangan (PP). Koefisien Pengeluaran Non Makanan sebesar 0.549 mengindikasikan bahwa setiap kenaikan 1 unit pada Pengeluaran Non Makanan akan meningkatkan pengeluaran pangan (PP) sebesar 0.549%, dengan asumsi variabel lain tetap konstan.

c. Interpretasi Dari Model Regresi Kuantil $\tau = 0,75$:

Dalam analisis yang dilakukan, nilai konstanta menunjukkan angka positif sebesar 4.177. Setelah di-antilogaritma-kan, nilai ini menjadi 0.6208. Angka ini mengindikasikan bahwa Pengeluaran Pangan (PP) di Indonesia pada tahun 2020 adalah 0.6208, dengan asumsi semua variabel independen lainnya bernilai nol dan faktor-faktor lain tetap konstan. Lebih lanjut, dari 75% kelompok data yang diteliti, ditemukan bahwa Pengeluaran Non Makanan (PNM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan (PP). Secara spesifik, nilai koefisien untuk variabel Pengeluaran Non Makanan (PNM) adalah 0.496. Ini berarti bahwa setiap kenaikan 1% pada Pengeluaran Non Makanan (PNM) akan menyebabkan peningkatan sebesar 0.496% pada Pengeluaran Pangan (PP), dengan asumsi variabel-variabel lain tetap konstan.

d. Interpretasi Dari Model Regresi Kuantil $\tau = 0,85$:

Interpretasi hasil regresi menunjukkan beberapa temuan penting terkait Pengeluaran Pangan (PP) di Indonesia pada tahun 2020. Pertama, nilai konstanta positif sebesar 3.492 (logaritma) atau 0.5430 (anti logaritma) mengindikasikan bahwa jika semua variabel independen bernilai nol, Pengeluaran Pangan (PP) adalah 0.5430, dengan asumsi faktor lain tetap. Analisis data menunjukkan bahwa Pengeluaran Non Makanan (PNM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan (PP) pada 85% kelompok data. Koefisien PNM sebesar 0.563 berarti setiap peningkatan PNM sebesar 1 unit akan meningkatkan PP sebesar 0.563%, dengan asumsi variabel lain konstan.

Model regresi kuantil ke-0.50 terbukti menjadi model terbaik karena menghasilkan nilai R² tertinggi dan memiliki interpretasi yang kuat dibandingkan kuantil lainnya. Model ini dirumuskan sebagai:

$$Y_{0.50} = 5.581 - 0.0643(\text{Log PKP}) - 1.718(\text{IG}) + 0.0767(\text{LogUMP}) + 0.549(\text{LogPNM})$$

Dalam model kuartil 50%, Upah Minimum Provinsi (UMP) menunjukkan pengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pengeluaran Pangan (PP). Temuan ini selaras dengan penelitian Hidayat & Haryatiningsih (2024) yang menjelaskan bahwa peningkatan upah minimum dapat mendorong pendapatan pekerja, sehingga meningkatkan daya beli rumah tangga dan mendorong pertumbuhan pengeluaran konsumsi per kapita, baik untuk kebutuhan dasar maupun barang/jasa tambahan. Sebaliknya, Pengeluaran Non Makanan (PNM) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan (PP). Hal ini konsisten dengan penelitian Widjajanti & Li (1996) yang menunjukkan hubungan terbalik antara konsumsi pangan dan non-pangan; peningkatan konsumsi pangan dapat menurunkan konsumsi non-pangan, dan sebaliknya. Tren ini mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, di mana konsumen mulai menyeimbangkan pengeluaran mereka ke arah konsumsi non-makanan yang meningkat, sementara permintaan makanan cenderung menurun.

E. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa poin utama terkait faktor yang memengaruhi pengeluaran pangan di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa variabel Upah Minimum Provinsi (UMP) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan pada kuartil 25% dan 50%, menunjukkan bahwa pada kelompok pendapatan menengah ke bawah, peningkatan UMP mungkin menggeser alokasi pengeluaran dari pangan atau memungkinkan pembelian pangan dengan kualitas lebih baik tanpa peningkatan porsi pengeluaran yang signifikan. Sementara itu, Indeks Gini, sebagai indikator ketimpangan pendapatan, terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan pada kuartil 25% dan 50%, mengindikasikan bahwa semakin tinggi ketimpangan, semakin besar pula porsi pengeluaran untuk pangan, terutama di segmen masyarakat berpendapatan rendah dan menengah. Prevalensi Ketidakcukupan Pangan (PKP) menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan pada kuartil 75% dan 85%, yang dapat diinterpretasikan bahwa pada kelompok masyarakat dengan pengeluaran pangan yang lebih tinggi, peningkatan kerawanan pangan justru dapat berkorelasi dengan penurunan pengeluaran pangan, mungkin karena dampak krisis yang lebih luas. Terakhir, Pengeluaran Non Makanan secara konsisten berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pangan pada kuartil 25%, 50%, 75%, dan 85%, menyiratkan adanya korelasi positif antara pengeluaran untuk kebutuhan non-pangan dengan pengeluaran pangan di berbagai segmen pengeluaran rumah tangga.

2. Saran

Pertama, bagi pemerintah Indonesia sebagai pemangku kebijakan, sangat diharapkan untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap angka Pengeluaran Pangan di masyarakat pada berbagai wilayah. Pengeluaran Pangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam keberlangsungan hidup dan menjadi tolak ukur penting dalam hal konsumsi serta kesejahteraan masyarakat, sehingga kebijakan yang tepat diperlukan untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Kedua, penelitian ini hanya menganalisis Pengeluaran Pangan di provinsi-provinsi Indonesia untuk satu periode waktu, yaitu tahun 2020. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data dengan rentang waktu atau periode yang lebih baru dan diperbarui, memungkinkan analisis tren perkembangan Pengeluaran Pangan dari waktu ke waktu serta memberikan wawasan yang lebih komprehensif. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat

mempertimbangkan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang dapat memengaruhi Pengeluaran Pangan, guna memperkaya model dan memberikan pertimbangan lebih lanjut bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk meningkatkan ketahanan pangan di waktu yang akan datang.

BIBLIOGRAPHY

- Amalia, I. N., & Mahmudiono, T. (2017). Hubungan Pendapatan, Total Pengeluaran, Proporsi Pengeluaran Pangan dengan Status Ketahanan Rumah Tangga Petani Gurem (Studi di Desa Nogosari Kecamatan Rambipuji Kabupaten Jember). *Amerta Nutrition*, 1(2), 143. <https://doi.org/10.20473/amnt.v1i2.6237>
- Badan Pusat Statistik. (2021). *Analisis Indeks Williamson Provinsi Jawa Tengah 2017-2021*. Badan Pusat Statistik. BPS. (2008). *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan 2008*.
- Eriawati, Y. (2019). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMSI PANGANDI INDONESIA. *Jurnal Education and Development*, 7(1).
- Faradina, R., Iskandarini, I., & Lubis, S. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengeluaran Konsumsi Pangan Rumah Tangga (Studi Kasus : Desa Karang Gading, Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat). *Talenta Conference Series: Local Wisdom, Social, and Arts (LWSA)*, 1(1), 284–295. <https://doi.org/10.32734/lwsa.v1i1.178>
- Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2023). *Asia and the Pacific Regional Overview of Food Security and Nutrition 2022*. FAO. <https://doi.org/10.4060/cc3990en>
- Gaol, M. D. F. B. L., & Sukim. (2023). Determinan Status Kerawanan Pangan Rumah Tangga di Nusa Tenggara Timur 2021. *Politeknik Statistika STIS*.
- Gujarati, D., & Porter, D. C. (2011). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Handriyani, R., Sahyar, M. M., & Arwansyah, M. (2018). Analysis the Effect of Household Consumption Expenditure, Investment and Labor to Economic Growth: A Case in Province of North Sumatra. *Studia Universitatis „Vasile Goldis“ Arad – Economics Series*, 28(4), 45–54. <https://doi.org/10.2478/sues-2018-0019>
- Hidayat, S. A., & Haryatiningsih, R. (2024). Pengaruh Inflasi, Upah Minimum dan Jumlah Penerima BLT terhadap Pengeluaran Konsumsi Perkapita di 7 Kota Jawa Barat Tahun 2018-2022. *Bandung Conference Series: Economics Studies*, 4(1), 190–197. <https://doi.org/10.29313/bcses.v4i1.10925>
- Ihsani, S. F., & Rohman, M. F. (2022). Distribusi Pendapatan dan Kemiskinan di Indonesia: Kasus Kebijakan Sentralisasi, Desentralisasi, dan Pandemi Covid-19. *Jurnal Ekonomi-Qu*.
- Koenker, R., & Hallock, K. F. (2001). Quantile Regression. *Journal of Economic Perspectives*, 15(4), 143–156. <https://doi.org/10.1257/jep.15.4.143>
- Lorenz, M. O. (1905). Methods of Measuring the Concentration of Wealth. *Publications of the American Statistical Association*, 9(70), 209. <https://doi.org/10.2307/2276207>
- Ningtias, E. N. A., & Anwar, A. F. (2021). Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Per Kapita terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies (BEST)*, 1(1). <https://doi.org/10.24252/best.v1i1.19637>
- Nisa, R., & Triani, M. (2024). Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan di Indonesia. *Media Riset Ekonomi Pembangunan (MedREP)*, 1(2).
- Sugianti, E., Putri, B. D., Hidayanti, H., & Buanasita, A. (2023). Prevalensi Ketahanan Pangan dan Hubungannya dengan Kejadian Stunting pada Rumah Tangga di Daerah Rawan Pangan. *Proceedings Series on Physical & Formal Sciences*, 5, 224–229. <https://doi.org/10.30595/psfps.v5i.727>
- Sukirno, S. (2019). *Makroekonomi Teori Pengantar* (Edisi Ketiga). Rajawali Pers.
- Todaro, M. p, & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi* (Edisi 11). Erlangga.
- Widjajanti, E., & Li, E. (1996). Food Expenditure Patterns in Urban and Rural Indonesia, 1981 to 1993. *Australian Agribusiness Journals*, 4.
- Wuryandari, R. D. (2015). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGELOUARAN MAKANAN, PENDIDIKAN, DAN KESEHATAN RUMAH TANGGA INDONESIA (ANALISIS DATA SUSENAS 2011). *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 10(1), 27. <https://doi.org/10.14203/jki.v10i1.53>
- Zainuddin, A., Utami, R. A., & Novikarumsari, N. D. (2020). ANALISIS DETERMINAN TINGKAT PENGELOUARAN KONSUMSI PANGAN DI JAWA TIMUR. *JSEP (Journal of Social and Agricultural Economics)*, 13(1), 92. <https://doi.org/10.19184/jsep.v13i1.170>